

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting sebagai penopang pembangunan negara dan menjadi salah satu pendorong dalam membangun kekuatan ekonomi negara. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja yang berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta berperan sebagai pengentas kemiskinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dapat dicermati pula dari keunggulan UMKM, yakni: (1) Menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, (2) Cukup fleksibel dan mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat, (3) Memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan (Narsa et al., 2012).

UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta yang merupakan 99,99% dari banyaknya unit usaha di Indonesia dibanding usaha besar yang hanya 0,01%. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang terserap oleh UMKM adalah sebesar 97% dari masyarakat Indonesia. Usaha kecil seperti koperasi dan UMKM juga turut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 61,07%.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2017 <sup>(1)</sup>		TAHUN 2018 <sup>(2)</sup>		PERKEMBANGAN TAHUN 2017-2018	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>UNIT USAHA (A+B)</b>	(Unit)	62.928.077		64.199.606		1.271.529	2,02
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Unit)	62.922.617	99,99	64.194.057	99,99	1.271.440	2,02
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	62.106.900	98,70	63.350.222	98,68	1.243.322	2,00
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	757.090	1,20	783.132	1,22	26.043	3,44
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	58.627	0,09	60.702	0,09	2.075	3,54
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Unit)	5.460	0,01	5.550	0,01	90	1,64
2	<b>TENAGA KERJA (A+B)</b>	(Orang)	120.260.177		120.598.138		337.961	0,28
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Orang)	116.431.224	96,82	116.978.631	97,00	547.407	0,47
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	105.509.631	87,73	107.376.540	89,04	1.866.909	1,77
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	6.546.742	5,44	5.831.256	4,84	-715.486	-10,93
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	4.374.851	3,64	3.770.835	3,13	-604.016	-13,81
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Orang)	3.828.953	3,18	3.619.507	3,00	-209.446	-5,47
3	<b>PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)</b>	(Rp. Milyar)	12.840.859,0		14.038.598,5		1.197.739,6	9,33
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	(Rp. Milyar)	7.820.282,6	60,99	8.573.895,3	61,07	753.612,8	9,64
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	4.827.398,9	37,59	5.303.075,7	37,77	475.676,8	9,85
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.234.334,1	9,61	1.347.104,3	9,60	112.770,2	9,14
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.758.549,6	13,69	1.923.715,4	13,70	165.165,7	9,39
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	(Rp. Milyar)	5.020.576,4	39,10	5.464.703,2	38,93	444.126,8	8,85

Gambar 1.1 Data Perkembangan UMKM Tahun 2017-2018

(Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2018)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, maka usaha mikro kecil menengah mendapatkan jaminan dan keadilan usaha, selain itu pemberlakuan ini juga dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Alfitri et al., 2014). Namun demikian, ada banyak sekali kendala yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya yaitu menghadapi pendanaan, seperti yang dinyatakan oleh (Tuti & Dwijayanti, 2016). UMKM membutuhkan pendanaan yang cukup besar dalam mengembangkan usahanya. Namun sebagian besar UMKM hanya menggunakan modal pribadi dan tidak ada pemisah antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan program pembiayaan UMKM melalui beberapa bank berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam rangka meningkatkan usahanya. Akan tetapi untuk dapat mengajukan pinjaman modal ke perbankan, UMKM perlu membuat laporan keuangan sebagai bentuk informasi akuntansi terkait kondisi usahanya. (Baas & Schrooten, 2006 dalam Rudiantoro & Siregar, 2012).

Laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan manajemen, maka dari itu UMKM juga harus mampu

untuk menyajikan laporan keuangannya supaya dapat menentukan kebijakan untuk perkembangan usahanya. Dengan adanya pembukuan, maka pelaku UMKM dapat mengetahui posisi keuangan dan kinerja usahanya dengan lebih akurat dan relevan serta mengetahui kesehatan usaha yang dimiliki. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi yang memadai (Hetika & Mahmudah, 2017). Menurut informasi yang dikutip dalam *Press Realease* kegiatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Juni 2016, mayoritas UMKM di Indonesia sulit mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan maupun dari sumber pendanaan lainnya karena UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku di industri keuangan.

Hidayanti et al. (2020) menyebutkan penyebab UMKM tidak menyusun laporan keuangan dalam usahanya adalah karena faktor internal yang kurang profesional atau kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat memahami standar akuntansi keuangan. Selain itu, Rudiantoro & Siregar (2012) menyebutkan adanya keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukan hal yang penting juga menjadi penyebab UMKM tidak menyusun laporan keuangan, yang dibuktikan pula oleh Ramdani et al. (2018) bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan).

Melihat pentingnya penerapan akuntansi bagi UMKM maka untuk memudahkan UMKM dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, IAI selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun standar akuntansi yang sesuai dan mudah dipahami oleh UMKM, karena SAK umum cukup sulit penerapannya pada pelaporan keuangan UMKM. Pada Oktober 2016, DSAK telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (ED SAK EMKM) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan

Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Tujuan dibuatnya SAK EMKM ini yaitu untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan (Ningtiyas, 2017). Hal ini akan membantu usaha kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. Diharapkan dengan adanya SAK EMKM ini para pelaku usaha dapat menjadikan informasi laporan keuangannya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perkembangan usahanya.

Kewajiban pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum membuat pembukuan akuntansi sesuai standar (Tuti & Dwijayanti, 2016). Dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, maka dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi akuntansi yang reliabel dan akuntabel mengenai kondisi keuangan UMKM yang sebenarnya, juga sebagai bahan evaluasi kinerja UMKM itu sendiri.

Kirowati & Amir (2019) menyatakan walaupun sudah ada aturan yang jelas dan mudah, nyatanya implementasi SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan UMKM masih terbilang rendah dikarenakan pemahaman dari sumber daya manusia di UMKM masih minim. Pemahaman bukan hanya berasal dari pengetahuan di bangku sekolah, namun juga dapat berasal dari pemberian informasi atau sosialisasi. Merujuk hal tersebut, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada penyusunan laporan keuangan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Janrosl (2018), Kusuma & Lutfiany (2018), serta Badria & Diana (2018) yang mengungkapkan bahwa informasi dan sosialisasi standar akuntansi dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait standar akuntansi. Semakin sering UMKM mendapatkan sosialisasi,

semakin tinggi pula implementasi standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan UMKM. Sosialisasi merupakan pengaruh sosial yang dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait standar akuntansi sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Namun berbeda dengan Febriyanti & Wardhani (2018) serta Parhusip & Herawati (2020) yang menyebutkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Hidayanti et al. (2020) menyebutkan faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi SAK EMKM adalah sumber daya manusia, di mana faktor sumber daya manusia yang dimaksud adalah mengacu pada tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansinya. Dikutip dari Adino (2019) investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas sebuah usaha sehingga implementasi standar akuntansi dapat terlaksana apabila adanya sumber daya manusia yang mendukung. Perbaikan kinerja perusahaan dan peningkatan daya saing dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pemahaman seseorang baik pemilik maupun karyawan sebagaimana hasil penelitian dari Kusuma & Lutfiany (2018) bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.

Dewi et al. (2017) menyebutkan dalam implementasi SAK EMKM, persepsi para pelaku usaha juga turut mempengaruhi. Persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Sebagaimana dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penggunaan standar akuntansi. Persepsi seseorang terhadap sesuatu timbul karena adanya beberapa stimulus yang mempengaruhi persepsi. Rudiantoro & Siregar (2012) mengemukakan bahwa pelaku UMKM dapat memiliki informasi yang berbeda dalam menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian terkait apa yang ada di sekitarnya, termasuk dalam hal ini mengenai pandangan pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Pradipta & Supadmi (2015), apabila pelaku UMKM mempersepsikan standar akuntansi mudah untuk digunakan, maka sistem tersebut akan sering digunakan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa

sistem tersebut mudah untuk dioperasikan sehingga dengan menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan performa dari individu itu sendiri. Suatu persepsi akan timbul jika individu meyakini pentingnya penggunaan sistem dan banyaknya manfaat yang akan diperoleh dalam penggunaan sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Febriyanti & Wardhani (2018) dan Hidayanti et al. (2020) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan.

Pada penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang menentukan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM yang mengacu pada penelitian Janrosl (2018). Akan tetapi pada penelitiannya yang ditunjukkan oleh uji R Square, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 53,9% yang artinya masih ada variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi. Sementara Hidayanti et al. (2020) mengungkapkan bahwa persepsi pelaku UMKM dan sumber daya manusia memiliki korelasi positif yang berarti memiliki pengaruh dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Maka dari itu penelitian ini melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi.

Penelitian ini mengambil sampel pada UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Beberapa alasan memilih obyek penelitian pada daerah tersebut yaitu karena perkembangan UMKM di Kabupaten Gresik terbilang cukup baik. Berdasarkan data dari Statistik Kabupaten Gresik pada tahun 2018, jumlah industri kecil di Kabupaten Gresik adalah sebanyak 19.484 unit, di mana pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun 2017. Sedangkan industri sedang di Kabupaten Gresik tahun 2018 sebanyak 526 unit, di mana mengalami kenaikan sebesar 8% dari tahun 2017. Untuk lebih detail dapat melihat tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Perkembangan UMKM Kabupaten Gresik 2017-2018**

No	Kecamatan	Industri Kecil			Industri Sedang			Industri Besar		
		2017	2018	%perubahan	2017	2018	%perubahan	2017	2018	%perubahan

1	Balongpanggung	179	183	2%	0	0	0%	0	0	0%
2	Benjeng	3682	3682	0%	21	21	0%	0	0	0%
3	Bungah	2685	2685	0%	6	6	0%	2	3	33%
4	Cerme	2553	2611	2%	99	134	26%	6	7	14%
5	Driyorejo	71	71	0%	61	61	0%	34	34	0%
6	Duduksampeyan	510	530	4%	20	22	9%	30	30	0%
7	Dukun	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8	Gresik	472	472	0%	19	19	0%	11	11	0%
9	Kebomas	1375	1555	12%	61	63	3%	50	50	0%
10	Kedamean	2324	2324	0%	1	1	0%	12	12	0%
11	Manyar	490	490	0%	38	38	0%	28	28	0%
12	Menganiti	1820	1821	0%	84	86	2%	28	29	3%
13	Panceng	123	123	0%	16	16	0%	0	3	100%
14	Sangkapura	660	660	0%	0	0	0%	0	0	0%
15	Sidayu	1252	1252	0%	15	15	0%	0	0	0%
16	Tambak	460	460	0%	0	0	0%	0	0	0%
17	Ujungpangkah	393	393	0%	0	0	0%	8	8	0%
18	Wringinanom	172	172	0%	44	44	0%	29	29	0%
<b>TOTAL</b>		<b>19221</b>	<b>19484</b>	<b>1%</b>	<b>485</b>	<b>526</b>	<b>8%</b>	<b>238</b>	<b>244</b>	<b>2%</b>

(Sumber: Data Statistik Kabupaten Gresik, diolah peneliti, 2020)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus, hal ini dibuktikan dengan adanya UMKM di Kabupaten Gresik yang berpotensi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dan ada kemungkinan jumlah UMKM di Kabupaten Gresik akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya sumber daya manusia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari berbagai perusahaan sebagai akibat dari adanya pandemi. Potensi ekonomi tidak hanya berasal dari industri besar, namun sektor UMKM juga menjadi salah satu sektor penting penyokong ekonomi di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk upaya agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan informasi akuntansi dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan agar dapat meningkatkan kualitas dan keandalan informasi laporan keuangan untuk kebutuhan pengambilan keputusan para pelaku UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat dijadikan sebagai motivasi oleh pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang menentukan implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan persepsi pelaku usaha dengan mengambil sampel penelitian pada UMKM di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Determinan Implementasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM bagi UMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kabupaten Gresik)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM?
3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM?
4. Apakah persepsi pelaku usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM.
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM.
4. Untuk menguji pengaruh persepsi pelaku usaha terhadap implementasi SAK EMKM bagi UMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku UMKM, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi pelaku UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sehingga dapat meningkatkan jumlah UMKM di Kabupaten Gresik yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku guna untuk meningkatkan kualitas informasi dan keandalan dari laporan keuangan tersebut.
2. Bagi pihak pemerintah dan CSR perusahaan, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Gresik khususnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk dapat menambah wawasan serta menganalisa lebih lanjut mengenai kondisi UMKM, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan UMKM.

(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)

